



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Selesaikan 208 Kegiatan Bermasalah

Bentuk MP TP TGR

TUBEL - Walaupun 7 kali menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 5 diantaranya diterima berturut, ternyata penggunaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong masih ada yang bermasalah. Bahkan 208 item kegiatan dengan nilai lebih Rp 1 miliar berpotensi Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Meliputi kegiatan dari tahun 2006 hingga 2020.

Atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong akan segera membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR). Soalnya 3 tahun terakhir tidak ada majelisnya. "Yang jelas majelisnya segera kami bentuk secepatnya untuk penyelesaian," ujar Bupati Lebong, Kopli Ansori usai rapat internal tindak lanjut hasil rapat

bersama BPK, kemarin (24/2).

Namun Kopli memastikan seluruh item temuan BPK itu akan diselesaikan. Baik yang sifatnya administrasi maupun yang sifatnya kelebihan bayar. "Seluruhnya, apa yang menjadi catatan BPK akan kami selesaikan dan saya sudah memerintahkan Sekda (Sekretaris Daerah, red) membentuk kembali struktur majelis TP TGR," terang Kopli.

Kepala Inspektora Daerah Kabupaten Lebong, Jauhari Candra, SP, MM mengatakan, sebenarnya temuan BPK mencapai 728 item kegiatan dengan nilai lebih Rp 4 miliar. Namun dari jumlah itu, 428 item sudah diselesaikan. "Sedangkan 36 item masih dalam proses, tetapi belum tahu diterima apa tidak oleh BPK," tukas Jauhari.

Di luar itu, masih ada 208 item yang belum diselesaikan sama sekali. Namun temuan BPK itu

diakui tidak berpengaruh terhadap penilaian WTP. "Tidak ada kaitannya dengan WTP, karena penilaian WTP akuntansi LKPD (laporan keuangan pemerintah daerah, red)," jelas Jauhari.

Terpisah, Sekda Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengatakan, dalam hal ini Pemkab Lebong bukan membentuk Majelis pertimbangan TP TGR baru. Namun hanya memperbarui struktur majelis yang sudah ada. "Soalnya tidak ada batasan waktu mengenai masa tugas majelis pertimbangan TP TGR," ungkap Sekda.

Data dihimpun, beberapa item temuan BPK itu tidak dibayarkannya pajak 107 unit kendaraan dinas sejak 2015 yang mencapai Rp 861 juta. Termasuk dugaan kelebihan bayar sejumlah kegiatan fisik di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (sca)